

Tinjauan Berbagai Aspek

Character Building

Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter?



Umar Suwito
Probosuseno

Seto Mulyadi (Kak Seto)

Tadkiroatun Musfiroh

Farida Hanum

Das Salirawati

Hajar Pamadhi

Rita Eka Izzaty

Hermanto SP

Mukti Amini

Anita Yus

Eva Imania Eliasa

Sri Lestari Linawati

Nova Indriati

Penyunting: **ARISMANTORO**

Katalog Dalam Terbitan

**Tinjauan Berbagai Aspek *Character Building*:
Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter?**

Penyunting: Arismantoro

Tiara Wacana, Yogyakarta
Mei 2008

Cetakan ke-1

x + 170 hlm.
21 cm.

ISBN:
978-979-1262-14-9
979-1262-14-4

Penyunting — Arismantoro
Pemerhati Teks — Anad
Tata Letak — Ramyari
Desain Sampul — Aye Z. Wafa

Pemakalah:

Kak Seto ; Rita Eka Izzaty ; Tadkiroatun Musfiroh ; Eva Imania
Eliasa ; Das Salirawati ; Probosuseno ; Umar Suwito ; Anita
Yus ; Sri Lestari Linawati ; Mukti Amini ; Nova Indriati ; Farida
Hanum ; Hajar Pamadhi ; Hermanto SP

Diterbitkan atas kerja sama:

LEMBAGA PENELITIAN Universitas Negeri Yogyakarta
dengan

Penerbit TIARA WACANA

- Jl. Kaliurang Km. 7,8, Kopen Utama No. 16, Banteng, Sleman, Yogyakarta 55581
- Tlp./Fax. 0274-880683
- e-mail: yogya@tiarawacana.co.id
- homepage: www.tiarawacana.co.id

❖ DAFTAR ISI ❖

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Bagian 1: Perspektif-perspektif tentang <i>Character Building</i>	1
Peranan Pendidikan dalam Membangun Karakter Anak	
Kak Seto	2
Peranan Aktivitas Pengasuhan pada Pembentukan Perilaku Anak Sejak Usia Dini	
Rita Eka Izzaty, M.Si., Psi.	13
Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter	
Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum.	25
Mendidik dan Membangun Kemandirian Anak dengan <i>Hypno-parenting</i>	
Eva Imania Eliasa, S.Pd.	36
Perlunya Penerapan Pendekatan Kasih Sayang dalam Proses Pembelajaran untuk Pengembangan Karakter Anak Didik	
Das Salirawati, M.Si.	46
Bagian 2: Subjek-subjek <i>Parenting</i>	55
Meretas Pola Hubungan Kakek-Nenek dan Cucu dalam Mengembangkan Karakter Anak	
dr. Probosuseno, Sp.P.D., K.Ger.	56
 <i>Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter?</i>	 ix

Menjadi Eyang yang Bijaksana	
Umar Suwito, M.Pd.	77
Pengembangan Karakter Melalui Hubungan Anak-Kakek-Nenek	
Anita Yus, M.Pd.	89
Pola Hubungan Ideal Anak-Pendidik untuk Pengembangan Karakter Anak	
Sri Lestari Linawati, S.S.	101
Pengasuhan Ayah-Ibu yang Patut: Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak	
Mukti Amini, S.Pd., M.Pd.	108
Pola Hubungan Ideal antara Anak dengan Ayah-Ibu untuk Pengembangan Karakter Anak	
Nova Indriati, S.E.	123
<i>Learning Society</i> sebagai Sarana Mencapai Generasi Penerus yang Memiliki Jati Diri Bangsa Indonesia	
Dr. Farida Hanum, M.Si.	132
Bagian 3: Kasus dan Anomali	145
Peran Pendidikan Seni Rupa dalam Mengatasi <i>Bullying Victim</i> Akibat <i>Parental</i> Subjektivisme	
Drs. Hajar Pamadhi, M.A. (Hons.)	146
Keberhasilan Pendidikan Nilai bagi Anak Hiperaktif	
Hermanto SP, M.Pd.	159



LEARNING SOCIETY
SEBAGAI SARANA MENCAPAI GENERASI PENERUS
YANG MEMILIKI JATI DIRI BANGSA INDONESIA
 (Suatu Tinjauan Sosiologis)

Dr. Farida Hanum, M.Si.

(Dosen Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta)

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dapat dikatakan dalam masa pancaroba, yang mana sedang terjadi banyak proses transformasi. Di antaranya transformasi dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa. Selain itu, masyarakat kita juga bergerak dari tipologi masyarakat tradisional menuju masyarakat demokratis, serta perubahan dari masyarakat feodal menjadi masyarakat egaliter. Keseluruhan proses itu telah menyebabkan sebagian anggota masyarakat mengalami disorientasi nilai. Dalam tingkatan ini hampir semua tingkatan kehidupan masyarakat terpengaruh. Terlebih pula anak yang dalam proses perkembangan kepribadian. Sebagai bangsa yang lama hidup dalam kondisi tradisional, dengan adanya berbagai perubahan-perubahan tersebut diperlukan hadirnya *Neotraditional Norm* agar kita dapat hidup tenteram dalam lingkungan baru itu. *Neotraditional Norm* yaitu nilai-nilai baru yang berakar pada nilai-nilai tradisional yang sesuai dengan tuntutan zaman baru. Jepang yang sangat modern tetap menghargai nilai-nilai tradisionalnya. Jepang telah berhasil membentuk *The New Traditional Norm* yang menjadi ciri khas karakter Bangsa Jepang. Masyarakat Indonesia pun diharapkan dapat berkembang modern dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga masyarakat Indonesia tidak

meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Artinya, Bangsa Indonesia dapat berpikir global dan bertindak lokal, tidak latah dengan gaya dan budaya yang kurang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Siswono (2004) mengutip Rowan Gibson yang menyatakan bahwa: *pertama*, masa depan kita nanti akan sangat berbeda dari masa lalu, dan karenanya diperlukan pemahaman yang tepat tentang masa depan itu. *Kedua*, *new time call for new organizations*. Dengan tantangan yang berbeda diperlukan organisasi yang berbeda yang disertai dengan ciri efisiensi yang tinggi, dan kecepatan bergerak. *Ketiga*, *where will we go next*. Dengan berbagai perubahan yang terjadi, setiap organisasi, institusi, misi perlu merumuskan secara tepat arah yang ingin dituju. Terutama lembaga yang sangat berkaitan dengan pendidikan karakter anak, seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita melalui berbagai ragam pendidikan telah menjadi kesadaran umum saat ini. Dalam kaitan itu, negara ada dalam posisi sentral sebagai penanggung jawab utama dari kesuksesan program pendidikan masyarakat sehingga negara dengan segala instrumennya harus memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan sarana pembelajaran masyarakat (*learning society*). Kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai luhur bangsa sangat diperlukan, sebab inilah yang akan mendasari *character building* watak dan kepribadian anak yang nantinya dapat menjadi jati diri anak bangsa.

B. LEARNING SOCIETY

Learning Society adalah masyarakat yang suka belajar atau masyarakat pembelajar. Proses menuju masyarakat yang demikian tidak harus dicapai melalui pendidikan formal tetapi juga harus dilakukan melalui berbagai bidang dan kondisi masyarakat. Namun, sebagian besar masyarakat maupun pengambil kebijakan yakin bahwa menghasilkan masyarakat yang terdidik harus melalui pendidikan formal (persekolahan), sehingga fokus perhatian dan energi sebesar-besarnya hanya dihabiskan untuk memperbaiki pendidikan formal tersebut.

Dengan kondisi masyarakat yang relatif miskin dan berjumlah besar ditambah kondisi geografis serta kultur masyarakat yang sangat be-

ragam, adalah tidak mungkin akan dicapai pendidikan persekolahan dengan mutu standar merata di seluruh pelosok tanah air. Oleh sebab itu banyak negara di dunia, terutama yang kondisi permasalahannya relatif mirip dengan Indonesia, menyadari bahwa untuk menciptakan masyarakat terdidik diperlukan alternatif yang lebih mendasar dan lebih hakiki bagi penduduknya. Sebagian besar negara-negara di dunia sadar betul, bahwa untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang baik harus ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan harus dimiliki oleh semua anggota masyarakat (*education for all*).

Sejumlah negara (khususnya negara maju) telah mencanangkan dan mengimplementasikan berbagai konsep pendidikan, seperti pendidikan sepanjang hidup/hayat (*Lifelong Education*), *Learning City*, *Learning Community* yang hasilnya akan menciptakan masyarakat pembelajar (*Learning Society*) dengan semangat *education for all* dan *all for education* (Diknas, 2003). Masyarakat pembelajar (*Learning Society*) menggambarkan masyarakat yang memiliki budaya baca, menulis, bertanya, dan bermoral serta santun perangnya. Budaya yang demikian menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki karakter bangsa yang terdidik dan santun. Masyarakat yang demikian akan menghasilkan *morale and ethic* (semangat berbuat baik dan etika). Masyarakat yang demikian jika menghasilkan sesuatu (produk) adalah produk yang baik (bermutu), jauh dari sikap yang meremehkan mutu karena cenderung mengerjakan sesuatu secara asal jadi, selesai dan setelah itu bukanlah persoalannya, serta bukan bermental asal-jadi yang penting pekerjaan itu dapat selesai, terlepas dari apakah pekerjaan itu bermutu atau tidak (Taufiq Ismail, 2005). Selain itu, ketika memberi layanan, masyarakat terdidik/pembelajar (*Learning Society*) akan menghasilkan layanan yang lebih baik (berkualitas), dan bisa melakukan sesuatu (proses) dengan sungguh-sungguh dan beretika. Jadi bukannya masyarakat bermental menerabas (cenderung mencari jalan pintas). Masyarakat bermental seperti ini menjadikan tujuan dan hasil sebagai segala-galanya. Padahal untuk menciptakan karakter yang baik manusia perlu mengalami proses yang baik pula.

Masyarakat terdidik dalam berekonomi, berhukum, bersosial, berbudaya akan menunjukkan keunggulan dibanding yang lain. Menurut

Howard (1993) hal itu karena masyarakat itu menunjukkan kepemilikan multi IQ yang lebih baik. Inilah sebenarnya masyarakat yang memiliki karakter sebagai bangsa yang bermartabat. Oleh sebab itu menciptakan masyarakat pembelajar (*Learning Society*) berarti menghasilkan bangsa yang berkarakter. Untuk dapat memiliki masyarakat yang demikian, perbaikan dan pengembangan pendidikan bukanlah dibatasi pada pendidikan persekolahan saja, tetapi hendaknya pendidikan yang dapat melibatkan banyak lembaga dan banyak rakyat yang harus benar-benar sangat diperhatikan dan didukung. Lembaga keluarga dan masyarakat, misalnya, adalah tempat sosialisasi utama bagi anak. Oleh karena itu harus menjadi perhatian serius.

Sosialisasi norma dan nilai-nilai yang menggambarkan jati diri Bangsa Indonesia dapat dimulai dari dalam keluarga, dengan keteladanan para orang dewasa sebagai pendidik anak-anak, seperti ayah, ibu, kakek, nenek. Mereka adalah sumber nilai masyarakat. Melalui didikan merekalah anak dapat ataupun tidak dapat menyesuaikan diri, dan diterima atau tidak diterima oleh lingkungan masyarakatnya. Visi dan misi masyarakat komunitasnya pun terlaksana melalui peran mereka. Penanaman nilai yang menyimpang oleh mereka akan berakibat bagi tingkah laku anak kelak, dan anaklah yang akan menanggung dampak dari kekeliruan tersebut. *Multiple effect* dari kekeliruan itu dapat berdampak pada negara dan bangsa, sebab anggota dari negara dan bangsa tidak lain adalah keluarga dan masyarakat. Bila menginginkan masyarakat pembelajar (yang gemar belajar), maka para pendidik pun harus menjadi masyarakat pembelajar (*learning society*). Pada dasarnya pendidikan mengandung pokok pikiran: (1) Tujuan pendidikan adalah peningkatan kehidupan yang bermuara pada kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan; (2) Belajar berkelanjutan semasa hidup akan terjadi bila tersedia pilihan kehidupan dan jenis kelompok masyarakat yang mendapat informasi secara lengkap dan jelas di lingkungan (habitat) hidup komunitas yang bersangkutan; (3) Belajar merupakan proses yang selalu terjadi dan merupakan bagian dari keseharian hidup manusia (komunitas); (4) Pendidik adalah orang dewasa yang berada di sekitar anak. Dengan demikian, setiap peluang untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat, berkualitas, dan baru di

dalam kehidupan komunitas perlu dimanfaatkan. Oleh sebab itu adalah suatu keharusan bahwa lingkungan komunitas selalu berorientasi pada keberadaannya sebagai sumber dan sarana pendidikan yang dapat membangun karakter dan jati diri anak.

C. MEMBANGUN JATI DIRI DENGAN TERUS BELAJAR

Dalam belajar tidak dikenal kata berhenti. Hidup adalah proses pembelajaran terus-menerus, UNESCO (PBB) mencanangkan pendidikan sepanjang hayat. Dalam kehidupan, anak-anak belajar untuk mendapat bekal hidup, dan orangtua belajar untuk dapat membekali hidup generasi penerusnya. Masing-masing diharapkan sukses dan bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Pendidikan sepanjang hayat (Unesco, 1972) memiliki dua dimensi, yaitu (1) dimensi "vertikal" yakni perluasan aktivitas pendidikan yang berjalan sepanjang hidup; dan (2) dimensi "horisontal" yakni aktivitas pendidikan yang mencakup bermacam-macam aktivitas manusia mulai dari aktivitas individu dalam mengisi waktu luang, kehidupan keluarga dan pekerjaan sampai pada peran warga negara dalam proses politik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan sepanjang hidup secara vertikal mengandung maksud bahwa pendidikan tidak dibatasi oleh usia dan secara horizontal bahwa pendidikan tidak dibatasi oleh wilayah pendidikan persekolahan (formal) tetapi mencakup bermacam-macam aktivitas belajar yang menyatu dengan kehidupan. Pendidikan atau belajar dapat berjalan dalam bermacam-macam lembaga, tempat, atau situasi kehidupan. Pengembangan masyarakat belajar sepanjang hidup menuntut perubahan sikap mengenai penghargaan dan layanan ke arah pendidikan bagi semua (*education for all*). Kegiatan pendidikan atau belajar tidak hanya dibatasi oleh pendidikan formal persekolahan, tetapi semua kegiatan pendidikan atau belajar yang berjalan dalam bermacam-macam lembaga, organisasi, ataupun situasi kehidupan. Hal itu harus dipandang atau dihargai sebagai bagian dari aktivitas belajar dan dapat menjadi wahana bagi pembentukan karakter bangsa. Pendidikan dalam konsep pendidikan sepanjang hidup memiliki tujuan yang plural (tidak tunggal), dengan lembaga penyelenggara dan kegiatan yang bermacam-

macam pula. Tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan ekonomis dalam upaya meningkatkan pendapatan atau membebaskan dari kemiskinan, tetapi juga mencakup tujuan pendidikan yang lebih luas hingga pada aspek "*being*" dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan, rasa ingin tahu intelektual, dan pemikiran yang membudaya (McMahon, 2002).

Pendidikan sepanjang hidup dapat mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang suka belajar dan menciptakan lingkungan yang dapat menjadi sumber belajar. Artinya, seluruh tempat yang ada di lingkungan masyarakat (kota dan desa) dapat dijadikan masyarakat sebagai wahana belajar. Interaksi antar anggota masyarakat dapat mencerminkan terjadinya proses pembelajaran. Transformasi pendidikan dan sosial terjadi di setiap saat dan tempat di masyarakat. Sehingga di masyarakat terdapat budaya saling asah, asih, dan asuh. Inilah cerminan dari bangsa yang berkarakter.

D. KONDISI KOTA/WILAYAH SEBAGAI WAHANA BELAJAR

Memudahkan masyarakat memperoleh sumber belajar diperlukan kondisi yang mendukung. *Learning City and Community* dimaksudkan agar aktivitas belajar dapat berjalan di berbagai tempat, situasi dan suasana yang dikondisikan oleh suatu kota/wilayah. Aktivitas pelajar ditujukan pada semua lapisan masyarakat tanpa mengenal umur dan status sosial. Semua sarana yang ada dapat menjadi sumber belajar seperti: bangunan-bangunan yang mengandung nilai edukatif, taman-taman umum; aturan/kebijakan dan pelayanan yang publik berpihak pada kepentingan pendidikan; tingkah laku masyarakat penghuni yang mencerminkan masyarakat terdidik, dan sebagainya. Untuk menciptakan kondisi di atas tentu saja dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah wilayah sebagai pengambil dan pelaksana keputusan. Melalui tata kota, aturan/kebijakan dan *event-event* yang ada di wilayahnya, masyarakat diajak aktif untuk berpartisipasi. Adapun suasana yang kondusif dari *Learning City and Community* dapat tercermin dari: 1) Masyarakat sebagai *Learning City and Community* seyogianya masyarakat yang memiliki

tingkah laku yang mencerminkan masyarakat terdidik. Ciri khas dan karakter yang baik dari masyarakat di wilayah itu harus tetap dipelihara dan disosialisasikan secara turun-temurun, sehingga jati diri masyarakat tersebut tidak pudar. Dalam proses pendidikan dan perkembangan kepribadian anak, orang dewasa di lingkungan tempat tinggal dan masyarakat adalah sumber belajar anak. Keteladanan dari orang dewasa di sekitar anak sangat besar berpengaruh pada anak. Dalam hal ini kontrol masyarakat sangat penting untuk menjamin kelangsungan nilai dan norma yang menjadi ciri khas jati diri Bangsa Indonesia. 2) Lingkungan fisik dan sosial, budaya lingkungan fisik kota, termasuk tata ruang wilayah seyogianya mencerminkan suasana yang menunjukkan keberpihakan pada pendidikan. Lingkungan yang sehat, bersih, dan aman harus diciptakan. Masyarakat terdidik adalah masyarakat yang menyukai kebersihan, keindahan, dan keteraturan (Lemlit UNY dan Bappeda DIY, 2004). Dalam hal ini pemerintah wilayah diharapkan benar-benar mampu menjadi sumber ketertiban dan keteraturan. Melalui Perdanya pemerintah wilayah/daerah dapat mengatur dan mendidik masyarakat agar mau dan mampu menciptakan lingkungan fisik yang sehat, teratur, dan tertib. Lingkungan sosial budaya suatu kota/komunitas tercermin dari keterdidikan penghuninya. Suasana lingkungan masyarakat pembelajar (*learning society*) harus tercermin dari tingkah laku penghuninya yang gemar belajar, membaca, dan bekerja serta memiliki budi pekerti yang sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sarana-sarana publik yang dapat mendidik masyarakat ke arah tersebut harus disediakan oleh pemerintah wilayah bersama penduduknya. Misalnya, masyarakat yang tidak mampu berlangganan koran dapat dengan mudah membacanya di sudut-sudut jalan di wilayah tersebut. Kata-kata bijak dapat dijumpai di lokasi-lokasi strategis, sehingga dapat membangun moral dan budi pekerti masyarakatnya. Tegur sapa antar masyarakat dapat mencerminkan tingkat laku orang-orang yang terdidik dan berbudaya. 3) Aktivitas dan *event* yang ada seyogianya bertujuan untuk lebih mendidik masyarakat terutama generasi penerus bangsa, dan seyogianya tidak semata-mata bertujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Aktivitas dan *event* gratis (amal) akan sangat bermanfaat memberi kesempatan kepada

rakyat miskin untuk menghibur diri, di samping dapat dijadikan sarana menambah wawasan diri. Bagi keluarga yang mampu, anak sejak dini sudah diajak berbagi dengan orang lain, untuk mendidihkan rasa kepedulian sosial dan meningkatkan kecerdasan emosional. Kontrol sosial dari masyarakat terhadap jenis dan kualitas penyelenggaraan aktivitas dan *event* adalah sangat penting. Jangan biarkan aktivitas dan *event* yang tidak bernilai edukatif (yang membuat masyarakat menjadi liar dan tidak bermoral) terlaksana. Masyarakat seyogianya diberi pedoman yang jelas dan jangan sampai masyarakat menghadapi situasi "anomie" (melemahnya aturan yang ada), sebab ini akan membawa kebingungan dan keresahan. Masyarakat yang memiliki jati diri adalah masyarakat yang memiliki pedoman hidup untuk membimbing langkah mereka secara benar. 4) Pelayanan publik dan *human relation* dari para petugas *public area* haruslah mencerminkan orang-orang terdidik. Pelayanan publik seyogianya tidak membeda-bedakan masyarakat menurut kelas sosialnya. Fasilitas-fasilitas publik dapat menggambarkan kondisi penghuni suatu kota/komunitas. Oleh sebab itu masyarakat pembelajar (*learning society*) akan sangat memperhatikan hal tersebut. Bila ingin menciptakan penghuni (anggota masyarakat) yang berkarakter, maka suasana yang kondusif dari *Learning City and Community* harus diciptakan secara terencana.

E. MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA MELALUI INTEGRASI SOSIAL YANG UTUH

Pendidikan adalah budaya yang *intangible* untuk membedakannya dari budaya *tangible* yang dapat disentuh yang berupa benda konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa tertentu. Kemajuan peradaban suatu masyarakat dapat diukur dari tingginya kualitas lembaga-lembaga pendidikannya. Di era globalisasi ini, dunia nasional semakin dituntut untuk berperan sebagai agen pembentuk peradaban bangsa. Ia dituntut untuk dapat membentuk nilai-nilai baru Indonesia yang berciri modern, dan dalam saat bersamaan menyaring berbagai pewarnaan yang datang dari luar. Proses akhir yang diharapkan adalah mengantar Indonesia ke peradaban modern yang tetap berciri Indonesia, yang

dapat menjadi karakter Bangsa Indonesia. Fritjof Capra, yang dikutip oleh Siswono Y. (2004), mengatakan bahwa semua sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber daya melewati batas-batasnya. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu saling mewarnai dan mempengaruhi. Oleh karenanya, keberhasilan kita sebagai suatu bangsa dalam berdemokrasi, akan juga mendorong kemajuan di bidang-bidang lain. Terutama pada penerimaan untuk dapat hidup dengan baik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang demikian plural, setiap kelompok mempunyai tugas penting untuk membangun kesadaran para penduduknya bahwa masing-masing unsur merupakan bagian dari seluruh bangsa. Selama ini salah satu faktor yang merenggangkan kesatuan bangsa ini adalah persoalan penerimaan yang belum tulus oleh sebagian dari kita atas pluralitas agama dalam masyarakat Indonesia. Sebaiknya dalam hal-hal yang bersifat mendasar, mekanisme politik yang digunakan adalah semangat Bangsa Indonesia dalam menyelesaikan perbedaan, yaitu musyawarah untuk mufakat bulat. Sehingga implementasi suatu keputusan dapat berjalan dan didukung setiap lapisan masyarakat, dan bukan merupakan bibit konflik. Untuk dapat sampai pada hal tersebut dibutuhkan pembelajaran masyarakat yang menyeluruh dan kontinyu melalui saluran-saluran pendidikan secara maksimal baik formal maupun informal. Furnivall dalam Pelly (1994) mengidentifikasi masyarakat jajahan Hindia Belanda, termasuk Indonesia, sebagai sebuah masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk memiliki ciri dominan berupa hidup berdampingan secara fisik, tetapi terpisah dan tidak tergabung dalam suatu unit politik karena adanya perbedaan sosial budaya di antara mereka. Pemikiran yang hampir sama tentang masyarakat majemuk datang dari Suparlan (2000) yang mendefinisikan sebagai suatu masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbaur tetapi tidak menjadi satu. Pendapat lebih tegas lagi datang dari Nasikun (1995) yang mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan ras, dan masing-masing sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu; sehingga kehidupan sosial

mereka tidak utuh. Masing-masing kelompok mempunyai agama, kebudayaan dan bahasa, serta cita-cita dan cara hidup masing-masing sebagai individu. Mereka saling bertemu, tetapi hanya di tempat umum seperti pasar, jarang mengadakan dialog, diskusi ataupun pertemuan-pertemuan yang dapat mendidik mereka untuk dapat saling memahami dan berempati agar dapat menuju ke suatu masyarakat yang memiliki interaksi sosial yang utuh. Masyarakat yang majemuk ini terdiri atas bagian-bagian yang merupakan komunitas-komunitas yang hidup saling berdampingan dalam sebuah satuan politik, tetapi saling terpisah atau tidak merupakan sebuah kesatuan. Mereka dipersatukan karena paksaan, dan tidak karena sukarela. Oleh sebab itu, pada masyarakat ini diperlukan pendidikan masyarakat yang dapat menyadari arti pentingnya interaksi sosial yang utuh. Melalui penyuluhan-penyuluhan maupun simbol-simbol yang dirancang, seyogianya memungkinkan masyarakat belajar bahwa interaksi sosial yang utuh adalah hal yang urgen untuk segera diwujudkan, agar konflik horizontal dapat terhindarkan. Dalam kehidupan di masyarakat Indonesia, terkadang ekspresi kesukuan tampak masih sering menimbulkan ketergantungan dalam hubungan antar suku bangsa. Dengan demikian, persepsi sosial dan sikap antargolongan etnis Indonesia juga terespresikan dengan jelas. Implikasi psikologis dari masyarakat yang mempunyai aneka ragam latar belakang kebudayaan, sebagaimana penelitian Tiriandis (dalam Waren, 2002), adalah bahwa stereotip, jarak sosial, dan hal-hal lain yang serupa dianggap meningkatkan konflik. Orang baru mulai sadar bahwa konflik tidak bisa direduksi dengan jalan tidak menghiraukan, dengan pura-pura bahwa konflik itu tidak ada, melainkan dengan jalan mempelajari, menganalisis, dan memahaminya. Dengan demikian dapat dicari solusi untuk dapat meniadakan atau paling tidak meminimalkan. Oleh sebab itu pembelajaran masyarakat tentang apakah konflik itu, mengapa konflik terjadi, apa bahaya dari konflik, dan bagaimana mengatasinya, sangatlah penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar, masyarakat dapat mengetahui, memahami, merasa dapat berbuat dan kemudian melembagakan tindakan-tindakan yang tidak melahirkan konflik tersebut dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bila pembelajaran pada masyarakat tidak dimaksimalkan pada

Bangsa Indonesia yang berciri masyarakat majemuk ini, dikhawatirkan masyarakat kita tidak siap menuju masyarakat modern yang di dalamnya banyak terjadi reformasi sosial, politik, dan fisik. Sebab reformasi berintikan demokratisasi, yang saat ini belum sepenuhnya menjadi kesadaran dan mentalitas masyarakat Indonesia. Sebagai contoh saja, perilaku berbangsa dan bernegara dalam masyarakat majemuk Indonesia terhadap masalah kebebasan dan toleransi antar umat beragama saja ternyata masih sangat jauh dari harapan. Benturan/konflik sosial yang didasarkan pada perbedaan agama dan keyakinan sering menjadi tragedi yang menyedihkan, merugikan bahkan menghilangkan nyawa ratusan umat manusia. Begitu pula timbulnya kekuatan politik yang terjadi dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah, seperti menganggap bahwa perbedaan pandangan, cara bersikap, dan bersikap totaliter, berperilaku anarkis adalah sebuah gambaran lain yang kasat mata dialami oleh anak bangsa. Untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dari dampak masyarakat majemuk di atas, diperlukan pembelajaran masyarakat terutama tentang bagaimana dapat hidup harmonis dalam perbedaan, yang diwujudkan dengan penghargaan pada perbedaan serta membiasakan diri hidup dalam perbedaan. Pendidikan masyarakat yang demikian ini tidak cukup hanya diwacanakan, namun benar-benar diwujudkan di berbagai kesempatan dan media pembelajaran masyarakat. Perlakuan yang adil pada semua komponen dan lapisan masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang mampu hidup dalam perbedaan. Tidak ada politik tirani mayoritas atau tirani minoritas. Politik monokulturalisme, monokulturalitas atau monokultural yang dilaksanakan Orde Baru atas nama stabilitas untuk pembangunan telah menghancurkan *local cultural geniuses* seperti tradisi “*pela gandong*” di Ambon, “*Republik Nagari*” di Sumatera Barat, dan lain-lain. Padahal sistem yang bersifat tradisi sosio-kultural seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tak ternilai, bukan hanya bagi masyarakat itu sendiri, tetapi juga bagi bangsa secara luas dalam membentuk karakter bangsa. Konflik-konflik kekuasaan yang terjadi yang bernuansa agama, politik, dan ras – khususnya yang marak sejak tahun 1996 – tidak lepas dari hancurnya *local geniuses* tersebut.

Pemaksaan yang monokulturalisme (keseragaman) memunculkan reaksi balik yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya “multi-kulturalis” (Azra, 2003). Pemenuhan dan perlindungan akan hak sosial, budaya, dan ekonomi rakyat, sangat bergantung pada komitmen negara, yaitu adanya campur tangan dan peran negara yang lebih aktif, terutama dalam pembelajaran masyarakat. Pendidikan merupakan bagian integral dan kegiatan resiprokal dari masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah proses mengakui hak-hak dan kewajiban perorangan dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak dan kewajiban warga negaranya diakui, dikembangkan, dihormati. Di dalam kaitannya dengan pembentukan negara sebagai wujud kebersamaan antar pribadi, maka lembaga-lembaga kehidupan bersama berfungsi untuk menghormati dan mengembangkan hak-hak demokrasi tersebut. Bila kondisi dapat berjalan di masyarakat, maka masyarakat demokratis yang dicita-citakan dapat terwujud.

F. KESIMPULAN

Membangun jati diri bangsa diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan dapat dipandang sebagai proses pendewasaan masyarakat agar menjadi warga terdidik atau masyarakat pembelajar (*learning society*). Secara ontologis, pendidikan menekankan pada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang ke arah yang baik dan terdidik. Oleh sebab itu pendidikan harus dimiliki oleh semua orang (*all for education*).

Untuk membantu masyarakat menjadi manusia terdidik maupun masyarakat yang memiliki jati diri bangsa, diperlukan para pendidik, sarana dan kondisi yang membantu proses pendidikan berjalan di masyarakat. Masyarakat yang belajar terus, kondisi kota/komunitas sebagai sumber belajar, dan integrasi sosial yang utuh serta belajar menerima perbedaan akan dapat melahirkan masyarakat pembelajar (*Learning Society*) dan dapat menjadi wahana membangun generasi yang memiliki jati diri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Michael. (2003). *The Art of HRD, Strategic HRM A Guide to Action*. Terjemahan. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Azra, Azyumardi. (2003). *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia dalam Poestaka*. Fakultas Sastra Udayana.
- Charles, Hoy, Jardine, Collin-Bayne and Word Margaret. (2000). *Improving Quality in Education*. Folmer Press, London and New York.
- Depdiknas. (2003). *Pendidikan untuk Semua*. Proyek Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta.
- Herbert, Rubin J. and Rubin S. Irene. (1992). *Community Organizing and Development*, 2nd Edition. Macmillan Publishing Company. New York.
- Howard, Gardner. (1993), *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. Basic Book A Division of Harper Collin Publishers. New York.
- Ismail, Taufiq. (2005). "Pencucian Citra SDM Warisan Kolonial, Peletakan Paradigma SDM Baru: Mungkinkah?". Pidato pada Dies Natalis UNY ke-41. 2005.
- Mc Mahon, Walter W. (2002). *Improving Education Finance in Indonesia*.
- Sarbiran, dkk. (2004). *Penyusunan Strategi Pemantapan Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Tahun 2000*. Kerjasama Lemlit dan Bappeda DIY.
- Nasikun. (1995). *Sistem Sosial Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada Indonesia. Jakarta.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. (1994). *Teori-teori Sosial Budaya*. Proyek Pembinaan dan Peningkatan Tenaga Kependidikan Dierjen Dikti Depdikbud. Jakarta.
- Siswono, Yudohusodo. (2004). "Menata Pendidikan Nasional Yang Bermutu Untuk Membangun Kualitas Kehidupan dan Peradaban Bangsa". Makalah Konaspi V. Unesa, Surabaya.
- UNESCO. (1972). *Learning to be, The World of Education Today and Tomorrow*. Unesco. Paris.
- Waren, Suwarsih. (2002). *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*. Mata Bangsa. Yogyakarta.

